



K E P U T U S A N
KEPALA PUSAT DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor : SK.214/PEPE/Dik-2/12/2016

T E N T A N G

KURIKULUM DAN SILABUS DIKLAT PEMETAAN KONFLIK TENURIAL

KEPALA PUSAT,

- Menimbang :
- a. bahwa konflik sumberdaya hutan termasuk konflik tenurial kehutanan merupakan masalah yang mendesak dan belum terselesaikan hingga saat ini sehingga menghambat terwujudnya pengelolaan hutan lestari;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan konflik tenurial terutama dalam pengelolaan sumberdaya hutan maka perlu meningkatkan kapasitas parapihak yang terkait konflik tenurial untuk memetakan konflik yang terjadi dengan penggunaan perangkat analisis *land tenure*;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai, masyarakat dan dunia usaha sebagaimana butir a dapat dilakukan melalui Diklat Pemetaan Konflik Tenurial;
 - d. materi penanganan konflik tenurial yang ada masih bersifat umum dan perlu dikembangkan menjadi satu diklat teknis dan aplikatif;
 - e. bahwa untuk tercapainya tujuan pada diktum a, b, c, dan d perlu ditetapkan kurikulum diklat dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU RI No. 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
 3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
 4. Peraturan

4. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.62/Menhut-II/2013;
5. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM DAN SILABUS DIKLAT PEMETAAN KONFLIK TENURIAL;

PERTAMA : Kurikulum dan Silabus Diklat Pemetaan Konflik Tenurial sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kurikulum dan silabus diklat sebagaimana diktum **PERTAMA** digunakan sebagai acuan dalam penyampaian materi Diklat Pemetaan Konflik Tenurial;

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor : SK. 35/Dik-2/2014 tentang Kurikulum dan Silabus Diklat Pemetaan Konflik dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 15 Desember 2016

KEPALA PUSAT,



JUKO PRIHATNO

NIP. 19600525 198903 1 005

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK
Nomor : SK. 214/Dik/PEPE/Dik-2/12/2016
Tanggal : 15 Desember 2016

1. **Nama Diklat** : Pemetaan Konflik Tenurial
2. **Jenjang Diklat** : Dasar
3. **Latar Belakang**

Pengaturan *land tenure* secara tepat dalam pengelolaan sumberdaya alam termasuk hutan merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pengelolaan hutan lestari. Kenyataan bahwa terdapat 9.103 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan negara (Dephut & BPS 2009) menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur *land tenure* secara tepat dan berkeadilan.

Pada kenyataannya konflik *land tenure* masih banyak terjadi dalam pengelolaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya hutan. Konflik dalam pengelolaan sumberdaya hutan biasanya terjadi antara masyarakat termasuk masyarakat adat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dengan pihak pengelola, baik pemerintah maupun swasta. Demi tercapainya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, maka konflik perlu diselesaikan secara baik dan adil dengan memperhatikan kepentingan para pihak secara obyektif.

Sebagai upaya penyelesaian konflik diperlukan pemahaman obyek konflik lebih dalam dan komprehensif. Dalam rangka peningkatan kompetensi para pihak dalam pemetaan konflik diperlukan adanya Diklat Pemetaan Konflik Tenurial.

4. Deskripsi Singkat Diklat

Diklat ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada para pemangku kepentingan tentang pemetaan konflik, analisis penyelesaian konflik, dan pendokumentasian data konflik.

Diklat ini berisi tentang pengetahuan dasar konflik pengelolaan sumber daya hutan, analisis konflik, pemetaan respon para pihak menuju resolusi konflik serta pendokumentasian data konflik.

Metode yang digunakan pada diklat ini adalah metode pembelajaran orang dewasa meliputi diskusi, simulasi, penugasan kelompok, ceramah, praktik lapangan, penyajian data lapangan dan pembuatan

laporan konflik tenurial. Skenario pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman peserta. Pembelajaran dilaksanakan secara *team teaching* antara widyaiswara dan narasumber. Mata diklat teori dan praktik kelas dilaksanakan di kelas, praktik lapangan dilaksanakan di lokasi praktik yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan memenuhi persyaratan.

5. Tujuan Diklat

Setelah mengikuti Diklat ini, peserta dapat memetakan konflik tenurial sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan resolusi konflik.

6. Sasaran Diklat

Setelah mengikuti Diklat ini peserta diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Tenurial
- b. Menjelaskan Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan
- c. Menjelaskan Analisis Sosial
- d. Menjelaskan *Rapid Land Tenurial Assessment* (RaTA)
- e. Menjelaskan Pengelolaan Data Konflik
- f. Menjelaskan Analisis Gaya Bersengketa (AGATA)
- g. Menjelaskan Analisis Gender dalam Pengelolaan Konflik Sumberdaya Hutan
- h. Mengumpulkan Data dengan RaTA dan Analisis Gender
- i. Memetakan Respon Parapihak terhadap konflik dengan AGATA
- j. Mendokumentasikan data konflik

7. Kelompok Sasaran Diklat

- a. Jumlah peserta : Maksimal 20 orang per kelas
- b. Asal peserta: UPT Kementerian LHK baik Pusat maupun Daerah, LSM, Dinas yang menangani urusan Kehutanan Prov, pemegang IUPHH, pemegang IPPKH, Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (tokoh) masyarakat dan pihak lain yang terkait konflik tenurial.
- c. Persyaratan peserta :
 - Belum pernah mengikuti Diklat yang sejenis.
 - Sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
 - Membawa surat tugas dari instansinya.
 - Memiliki komitmen mengikuti pelatihan secara penuh.

8. Pengajar

- a. Persyaratan pengajar :

- Menguasai materi yang diberikan baik teori maupun praktik.
 - Memiliki kemampuan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar.
 - Mampu mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran
- b. Asal pengajar/widyaiswara :
- Pusat Diklat SDM LHK/Balai Diklat SDM LHK
 - Instansi/Lembaga terkait lainnya

9. Tempat Diklat

Diklat dilaksanakan di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Diklat/Latihan SDM LHK dan tempat lain yang memenuhi persyaratan.

10. Waktu Diklat

Diklat dilaksanakan selama 6 hari setara dengan 54 jam pelajaran @ 45 menit, yang terdiri dari 24 jpl teori dan 30 jpl praktik.

11. Peralatan dan Bahan Diklat:

- a. Untuk kebutuhan peserta: Name Tag, Perlengkapan Alat Tulis, Bahan Ajar/Hands Out, Kalkulator
- b. Untuk Ruang Kelas: Papan tulis dan spidol, Komputer, Flip chart, LCD dan alat bantu lainnya.
- c. Untuk praktik : GPS, alat tulis, tape recorder, laptop, Software pendokumentasian data.

12. Daftar Mata Diklat

No.	Mata Diklat	JPL
I.	Teori	24
1.	Bina Suasana Pelatihan	2
2.	Kebijakan Kehutanan terkait Tenurial	2
3.	Konflik Pengelolaan Sumber Daya Hutan	2
4.	Analisis Sosial	3
5.	<i>Rapid Land Tenure Assessment</i> (RaTA)	6
6.	Analisis Gender dalam Pengelolaan Konflik Sumberdaya Hutan	2
7.	Analisis Gaya Bersengketa (AGATA)	4
8.	Pengelolaan Data Konflik	3
II.	Praktik	30
1.	Pengumpulan Data dengan RaTA dan Analisa Gender	10
2.	Pemetaan Para Pihak dengan AGATA	10
3.	Pendokumentasian Data Konflik	10
	JUMLAH	54

13. Silabus Diklat Pemetaan Konflik Tenurial

No.	Mata Diklat	JPL	Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Keterampilan	a. Metode b. Alat Bantu Pembelajaran	Sumber Kepustakaan
I.	Teori	24				
1	Bina Suasana Pelatihan	2	Setelah mengikuti mata diklat ini peserta mampu: - Saling mengenal satu sama lain dan berkomunikasi secara lancar - Meningkatkan motivasi berlatih dan bekerjasama - Menjelaskan 9 nilai dasar rimbawan - Menginternalisasikan Nilai-Nilai Revolusi Mental - Menjelaskan alur dan norma pelatihan	1. Perkenalan 2. Motivasi berlatih dan bekerjasama 3. Sembilan Nilai Dasar Rimbawan 4. Nilai-Nilai Revolusi Mental 5. Alur dan Norma pelatihan	a. Permainan, Diskusi, Penugasan b. LCD Proyektor, Papan Tulis, Flip chart, Spidol, Bahan Permainan	LAN RI, 1994. <i>Pengenalan Dinamika Kelompok</i> . Jakarta
2.	Kebijakan Kehutanan terkait Tenurial	2	Setelah mengikuti mata diklat ini peserta mampu: - Menjelaskan kebijakan kehutanan tentang penguasaan tanah (kawasan hutan) - Menjelaskan peraturan perundangan lain tentang penguasaan tanah - Menjelaskan peraturan perundangan lain tentang pengelolaan hutan	1. Kebijakan kehutanan tentang penguasaan tanah 2. Peraturan dan perundangan lain tentang penguasaan tanah 3. Peraturan perundangan lain tentang pengelolaan hutan	a. Ceramah, diskusi, tanya jawab, b. LCD Proyektor, Komputer, Papan tulis, Flipchart, Spidol, Alat tulis.	Bunga Rampai Hukum Kehutanan dan SDA (Budi Riyanto, 2005)
3.	Konflik Pengelolaan Sumberdaya Hutan	2	Setelah mengikuti mata diklat ini peserta mampu: - Menjelaskan fakta pengelolaan SDH di Indonesia - Menjelaskan pengertian konflik - Menjelaskan bentuk-bentuk konflik Pengelolaan SDH - Menjelaskan pendekatan penyelesaian konflik	1. Fakta Pengelolaan SDH di Indonesia 2. Pengertian konflik 3. Bentuk-bentuk konflik Pengelolaan SDH 4. Pendekatan penyelesaian konflik	a. Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan b. LCD Proyektor, Komputer, Papan tulis, Flipchart, Spidol, Alat tulis.	- Fisher et al (2001) <i>Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak</i> . - Malik et al (2003) <i>Menyeimbangkan Kekuatan Piluhan Strategi Menyelesaikan Konflik atas SDA</i>
4.	Analisis Sosial	3	Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan mampu: - Menjelaskan kerangka analisis sosial	1. Kerangka Analisis Sosial 2. Pengenalan masyarakat 3. Pemetaan Sosial Masyarakat	a. Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan	Cavestro (2003) P.R.A., Freudenberger (1999). RRA dan PRA

No.	Mata Diklat	JPL	Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Keterampilan	a. Metode b. Alat Bantu Pembelajaran	Sumber Kepustakaan
			<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan berbagai unsur masyarakat - Menjelaskan cara pemetaan sosial masyarakat - Menjelaskan sikap asesor konflik 	4. Sikap assesor konflik	b. LCD Proyektor, Komputer, Papan tulis, Flipchart, Spidol, Alat tulis.	Studio Drya Media (1990). Berbuat Bersama, Berperan Setara.
5.	<i>Rapid Land Tenure Assessment</i> (RaTA)	6	Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan mampu : <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan pengertiandasar RaTA - Menjelaskan cara penggunaan RaTA - Menjelaskan cara membuat sketsa dan memverifikasi obyek konflik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertiandasar RATA 2. Cara Penggunaan RATA 3. Pembuatan sketsa dan verifikasi obyek konflik 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan b. LCD Proyektor, Komputer, Papan tulis, Flipchart, Spidol, Alat tulis. 	Galudra et al. (2006, 2010, 2013). Rapid Land Tenure Assesment
6.	Analisis Gender dalam Pengelolaan Konflik Sumberdaya hutan	2	Setelah mengikuti mata diklat ini peserta mampu : <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan pengertian Gender - Menjelaskan perlunya analisis gender - Menjelaskan cara analisis gender 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Gender 2. Perlunya analisis gender 3. Cara analisis gender 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan b. LCD Proyektor, Komputer, Papan tulis, Flipchart, Spidol, Alat tulis. 	Analisis Jender dalam Pembangunan Hukum (Bppen as 2001)
7.	Analisis Gaya Bersengketa (AGATA)	4	Setelah mengikuti mata diklat ini peserta mampu : <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan pengertian AGATA - Menjelaskan tujuan AGATA untuk penyelesaian konflik - Menjelaskan cara pemetaan respon para pihak - Menjelaskan cara penggunaan AGATA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian AGATA 2. Tujuan AGATA untuk peyelesaian konflik 3. Cara pemetaan respon para pihak 4. Menjelaskan cara penggunaan AGATA 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan b. LCD Proyektor, Komputer, Papan tulis, Flipchart, Spidol, Alat tulis. 	Pasya G & Sirait MT (2011). Analisis Gaya Bersengketa
8.	Pengelolaan data Konflik	3	Setelah mengikuti mata diklat ini peserta mampu : <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskanperlu nya pengelolaan data konflik - Mengenal dan memilih perangkat lunak pengelolaan konflik - Menjelaskan cara penggunaan perangkat lunak pengelolaan konflik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ppengelolaan data konflik 2. Pengenalan perangkat lunak pengelolaan konflik 3. Cara penggunaan perangkat lunak pengelolaan konflik 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan b. LCD Proyektor, Komputer, Papan tulis, Flipchart, Spidol, Alat tulis. 	Didin S et al (2008). Manual Database Pendokumentasian Konflik Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya (HuMaWin)

No.	Mata Diklat	JPL	Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Keterampilan	a. Metode b. Alat Bantu Pembelajaran	Sumber Kepustakaan
II.	PRAKTIK	30				
1.	Pengumpulan Data dengan RaTA dan analisa Gender	10	Setelah mengikuti mata diklat praktik ini peserta diharapkan dapat: - Memetakan obyek konflik - Memetakan subyek (para pihak) konflik (termasuk perempuan) - Mendeskripsikan sejarah kebijakan pengelolaan lahan - Mendeskripsikan sistem tenure (kepemilikan lahan) akibat kebijakan	1. Pemetaan obyek konflik 2. Pemetaan subyek konflik 3. Alur sejarah kebijakan pengelolaan lahan 4. Sistem tenurial yang terjadi	a. Penugasan, Praktik, Diskusi, Kunjungan, Presentasi b. Kertas plano, Peta, GPS, Komputer, Spidol, metaplan, lem, selotif	Galudra et al. (2006, 2010, 2013). Rapid Land Tenure Assesment
2.	Memetakan para pihak dengan AGATA	10	Setelah mengikuti mata diklat praktik ini peserta dapat: - Membantu para pihak menganalisa kekuatan klaimnya - Memetakan gaya sengketa para pihak	1. Analisa kekuatan klaim 2. Pemetaan gaya sengketa para pihak	a. Penugasan, Praktik, Diskusi, Kunjungan, Presentasi b. Kertas plano, Peta, GPS, Komputer, Spidol, metaplan, lem, selotif	Pasya G & Sirait MT (2011). Analisis Gaya Bersengketa
3.	Mendokumentasikan data konflik	10	Setelah mengikuti mata diklat praktik ini peserta dapat: - Melakukan instalasi perangkat lunak pendokumentasian konflik - Mendokumentasikan data konflik hasil RaTA dan AGATA dalam perangkat lunak - Menyusun laporan hasil kajian pemetaan konflik	1. Instalasi perangkat lunak 2. Pendokumentasian data konflik hasil RaTA dan AGATA perangkat lunak 3. Laporan hasil kajian pemetaan konflik	a. Penugasan, Simulasi, Praktik, Kunjungan, Presentasi b. Kertas plano, Peta, Komputer, Spidol, metaplan, lem, selotif, HVS	Didin S et al (2008). Manual Database Pendokumentasian Konflik Tanah dan Kekayaan Alam Lainnya (HuMaWin)



KERALA PUSAT,

JOKO PRIHATNO

NIP. 19600525 198903 1 005